

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. . Buku

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Ahmad S. Ruky, *Sistem Manajemen Kinerja Panduan Praktis Untuk Merancang Kinerja Prima*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Bernard Arief Sidharta, "Penelitian Hukum Normatif : Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal" dalam: Sulistyowati Irianto dan Shidarta (eds), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Gostick, Adrian & Dana Telford, *Keunggulan Integritas (Judul Asli: The Integrity Advantage*. Alih Bahasa: Fahmi Ihsan). Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2006.
- Hani Handako T, *Manajemen Edisi II*. Yogyakarta: BFPE, 1990.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Kansil C. S T, *Pengantar Ilmu Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1988.
- Kerlinger F. N & Lee H. B, *Foundations of Behavioral Research* (4th.Ed.). Orlando: Hartcourt College Publishers, 2002.
- Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidhrata, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni, 2016.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara Daerah (Buku Ajaran)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Glora Madani Press, 2004.
- Sjachran Basah, *Tiga Tulisan tentang Hukum*. Bandung: Penerbit Armico, 1986.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.

## **2. Peraturan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

### 3. Sumber Lainnya

Angelica et al, "Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Proses Pemberian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk Cabang Batam," Jurnal Measuremen 3 No. 2, 2016.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, 2014.

BPKP, "Pengawasan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah", <<https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2746/16.059-Pengawasan-dalam-Undang-undang-Pemerintah-Daerah>> diakses pukul [29/01/2023] diakses pukul 22.30 WIB.

Erika Dyah, "UU Ciptaker Dinilai Bisa Cegah Korupsi Pengadaan Barang/Jasa", <<https://www.finance.detik.com/berita/-ekonomi-bisnis/d-58489%2027/uu-ciptaker-dinilai-bisa-cegah-korupsi-pengadaan-barangjasa>> [10/12/2021] diakses pukul 13.12 WIB

ICW, "Mengawasi Proyek Pemerintah Lewat Open Tender", <<https://antikorupsi.org/id/article/mengawasi-proyek-pemerintah-lewat-opentender>> [12/12/2019] diakses pukul 14.44 WIB

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis Dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 2 Mei 2013

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "APIP dan Pembangunan Nasional", <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12997/API>>

P-dan-Pembangunan-Nasional.html>,[19/03/2020] diakses pukul 21.51 WIB.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar, Tahun 2018.

LKPP, Jurnal Pengadaan Pengantar Redaksi, Vol. 3, No. 3, 2013.

Mohammad Yuhdi, Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 15, No. 1, 2013.

Muhammad Iqbal, Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM, Jurnal USM Law Review 3, No. 1, 2020.

Muhammad Nur Aflah, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, Kedudukan Hukum Aparatur Pengawas Intern Pemerintah dalam Pengawasan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal USM Law Review Vol. 4 No. 2, 2021.

Pasaribu, Pramella Yunindar dan Briando, Bobby, Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, No. 2, 2019.

AAIPI, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2014.

Wahyu Riyanto, Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut pada Tahap Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa (JPBJ), Vol. 1, No. 2, 2022.